

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Deskripsi Penelitian

Bab ini menyajikan hasil temuan penelitian yang diperoleh melalui serangkaian proses pengumpulan data yang meliputi observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan utama, kunci, dan pendukung, serta studi dokumentasi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gunungsitoli. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan Data – dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Reduksi Data – memilah data penting, menyaring informasi relevan, serta mengelompokkan sesuai tema/indikator Robbins (kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, keterampilan).
3. Penyajian Data – menyusun hasil wawancara dan temuan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan kutipan langsung dari informan.
4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi – menyimpulkan makna dari data, membandingkan dengan teori, dan memastikan konsistensi melalui triangulasi antar-informan.

Dengan alur ini, temuan penelitian tidak hanya mendeskripsikan kondisi nyata, tetapi juga menilai sejauh mana strategi perencanaan SDM di BPBD Kota Gunungsitoli berkontribusi pada efektivitas penanggulangan bencana..

4.1.2 Nama – Nama Key Informan

Berikut key informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Key Informa

No.	Nama	Jabatan	
1	Adima P. Harefa, S.Th, M.Si	Kepala Badan	Informan Utama / Kunci
2	Radius Gea, ST	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan	Informan Kunci
3	Angalita Anugrah Zebua	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Informan Kunci
4	Ir. Amonita Telaumbanua, ST	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	Informan Pendukung
5	Piter Samaira Zai, S.Pi	Analisis Mitigasi Bencana	Informan Pendukung

Sumber diolah peneliti 2025

4.1.3 Karakteristik Penelitian

Karakteristik penelitian ini didasarkan pada fokus, lokasi, pendekatan, serta sumber data yang digunakan, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai lingkup dan batasan penelitian. Beberapa karakteristik penting dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan secara mendalam strategi perencanaan sumber daya manusia (SDM) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gunungsitoli. Melalui pendekatan ini, data yang

diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga dianalisis untuk menemukan makna dan relevansi dengan teori yang mendasarinya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gunungsitoli, sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab utama dalam penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis BPBD dalam mengkoordinasikan kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana.

3. Subjek Penelitian (Informan)

Subjek penelitian terdiri dari informan utama, kunci, dan pendukung yang memiliki posisi strategis serta pengalaman langsung dalam pengelolaan bencana. Informan utama adalah Kepala BPBD Kota Gunungsitoli, sementara informan kunci meliputi para Kepala Bidang (Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik). Informan pendukung adalah pejabat teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Mitigasi Bencana. Keberagaman posisi ini memberikan sudut pandang yang komprehensif terhadap strategi perencanaan SDM di BPBD.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Data penelitian diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu:
- b. Observasi langsung, untuk memahami kondisi nyata di lapangan.
- c. Wawancara mendalam, dilakukan dengan informan utama, kunci, dan pendukung guna menggali pengalaman, strategi, serta tantangan yang dihadapi dalam perencanaan SDM.
- d. Studi dokumentasi, mencakup dokumen resmi BPBD, seperti SOP, laporan kegiatan, dan regulasi yang berlaku.

2. Indikator Analisis

Analisis penelitian ini mengacu pada indikator efektivitas kerja yang dikemukakan oleh Robbins, meliputi: kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan keterampilan (skill). Setiap indikator digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi sejauh

mana strategi perencanaan SDM berkontribusi terhadap efektivitas penanganan bencana di Kota Gunungsitoli.

3. Konteks Penelitian

Penelitian ini berlangsung dalam konteks organisasi pemerintahan daerah dengan tantangan khas, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, logistik, dan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi aktual BPBD, tetapi juga memberikan masukan mengenai peluang perbaikan strategi perencanaan SDM dalam menghadapi dinamika bencana di masa mendatang.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Kualitas Kerja

1. Bagaimana Bapak/Ibu menilai kualitas kerja dari anggota tim dalam merespons penanganan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap beberapa informan kunci dan pendukung di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli, mereka menyampaikan bahwa kualitas kerja anggota tim dalam merespons penanganan bencana dinilai positif dan responsif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan di lapangan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya dan kendala koordinasi antarlembaga. Adima P. Harefa, S.Th, M.Si, selaku Kepala BPBD Kota Gunungsitoli dan informan utama/kunci, menyatakan bahwa:

“Sebagai pimpinan, saya melihat bahwa anggota tim kami memiliki dedikasi tinggi dalam menangani setiap kejadian bencana. Mereka cepat tanggap, bekerja sesuai dengan SOP, dan mampu berkolaborasi dengan instansi lain. Walaupun dalam beberapa situasi ada keterbatasan logistik atau komunikasi, semangat mereka untuk hadir di tengah masyarakat sangat saya apresiasi.” Jumat, 13 Juni 2025.

Radius Gea, ST, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan, menambahkan:

“Saya mendukung pernyataan Bapak Kepala. Di bidang pencegahan dan kesiagaan, kami menilai anggota tim cukup sigap dalam menyebarkan informasi dini dan melakukan simulasi kesiapsiagaan. Mereka paham akan tanggung jawabnya, dan terus belajar dari pengalaman penanganan sebelumnya.” Jumat, 13 Juni 2025.

Sementara itu, Angalita Anugrah Zebua, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, juga menyampaikan hal serupa:

“Dalam bidang kedaruratan, kecepatan dan koordinasi adalah kunci. Tim kami selama ini sudah menunjukkan reaksi cepat terhadap laporan bencana. Mereka turun ke lapangan tanpa menunggu perintah panjang, dan punya semangat tinggi walau kadang fasilitas yang kita miliki belum ideal.” Jumat, 13 Juni 2025.

Pernyataan para informan kunci ini kemudian diperkuat oleh dua informan pendukung, yaitu pejabat teknis di bidang rehabilitasi dan mitigasi. Ir. Amonita Telaumbanua, ST, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, menyampaikan:

“Sebagai pendukung dari sisi rehabilitasi, saya melihat kerja tim di tahap tanggap darurat sangat membantu kami dalam menentukan langkah rehabilitasi. Informasi yang mereka kumpulkan akurat, dan respons awal yang mereka berikan mempercepat proses pemulihan.” Jumat, 13 Juni 2025.

Piter Samaira Zai, S.Pi, yang bertugas sebagai analis mitigasi bencana, juga menyatakan bahwa:

“Saya mendukung semua yang telah disampaikan oleh pimpinan dan rekan-rekan di bidang. Memang benar, anggota tim menunjukkan komitmen tinggi dalam penanganan bencana. Bahkan dalam upaya mitigasi, mereka proaktif

memberikan masukan berdasarkan pengalaman mereka di lapangan.” Jumat, 13 Juni 2025.

Dengan demikian, dari berbagai perspektif pimpinan dan pelaksana teknis di BPBD Kota Gunungsitoli, dapat disimpulkan bahwa kualitas kerja tim dalam merespons penanganan bencana dinilai baik, dengan semangat kolaboratif, ketanggapan yang memadai, serta keterbukaan dalam berkoordinasi meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan fasilitas dan sumber daya.

2. Apakah ada standar mutu kerja yang diterapkan secara khusus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini terhadap sejumlah informan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gunungsitoli, diperoleh informasi bahwa secara umum BPBD Kota Gunungsitoli telah menerapkan standar mutu kerja tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Informasi ini disampaikan oleh informan utama dan dikuatkan oleh informan pendukung. Adima P. Harefa, S.Th., M.Si., selaku Kepala Badan sekaligus informan utama/kunci, menyampaikan bahwa:

"Kami di BPBD Kota Gunungsitoli memiliki standar mutu kerja yang secara garis besar mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta pedoman teknis dari BNPB. Di samping itu, kami juga menyusun SOP internal untuk setiap bidang, baik dalam aspek pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Standar mutu ini kami gunakan sebagai acuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dan pelayanan berjalan secara sistematis, efisien, dan bertanggung jawab."
Jumat, 13 Juni 2025

Pernyataan ini diperkuat oleh Radius Gea, ST, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Informan Kunci), menyampaikan bahwa

"Kami di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mengikuti standar kerja yang jelas, seperti tahapan penyusunan rencana kontinjensi, pelatihan relawan, dan sosialisasi kebencanaan. Semua kegiatan tersebut memiliki indikator keberhasilan yang menjadi bagian dari standar mutu kerja kami." Jumat, 13 Juni 2025

Selanjutnya, Angalita Anugrah Zebua, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Informan Kunci), menyampaikan bahwa:

"Dalam bidang kedaruratan dan logistik, standar mutu kerja sangat penting karena berkaitan langsung dengan kecepatan dan ketepatan penanganan saat terjadi bencana. Oleh karena itu, kami berpedoman pada SOP distribusi logistik, pengaktifan posko, dan koordinasi lintas sektor." Jumat, 13 Juni 2025

Sementara itu, Ir. Amonita Telaumbanua, ST, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Informan Pendukung), menyatakan bahwa:

"Kami mendukung sepenuhnya pernyataan yang telah disampaikan oleh pimpinan dan para kepala bidang lainnya. Dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pun, kami mengikuti prosedur standar kerja yang sudah ditetapkan, termasuk dalam proses pengajuan proposal bantuan, pelaksanaan kegiatan fisik, hingga pelaporan. Ini bagian dari komitmen kami terhadap mutu dan akuntabilitas." Jumat, 13 Juni 2025

Hal serupa juga ditegaskan oleh Piter Samaira Zai, S.Pi, Analis Mitigasi Bencana (Informan Pendukung), yang menyatakan bahwa:

"Sebagai pelaksana teknis di lapangan, kami mengacu pada SOP yang telah disusun oleh bidang masing-masing. Dengan adanya standar mutu kerja tersebut, kami lebih mudah mengontrol kualitas pekerjaan dan memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat." Jumat, 13 Juni 2025

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa di BPBD Kota Gunungsitoli memang telah diterapkan standar mutu kerja secara

husus, baik yang mengacu pada regulasi nasional maupun yang dikembangkan secara internal melalui SOP masing-masing bidang. Para informan utama menyampaikan hal ini sebagai bagian dari kerangka kerja organisasi, dan informan pendukung menegaskan bahwa penerapan standar tersebut nyata dirasakan dan dijalankan dalam praktik kerja sehari-hari.

3. Sejauh mana pelatihan atau pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli?

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pelatihan dan pembinaan pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gunungsitoli menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas kerja pegawai. Dalam hal ini, informan utama/kunci, Adima P. Harefa, S.Th, M.Si, selaku Kepala Badan, menyampaikan bahwa:

“Sebagai kepala BPBD, saya menilai pelatihan dan pembinaan pegawai sudah menjadi perhatian serius. Kami secara berkala mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh BNPB maupun lembaga lain yang relevan, baik di tingkat regional maupun nasional. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek kebencanaan, seperti manajemen risiko bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.” Senin, 16 Juni 2025.

Pernyataan ini turut diperkuat oleh informan kunci, Radius Gea, ST, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan, yang menambahkan bahwa:

“Saya sepenuhnya sependapat dengan yang disampaikan oleh kepala BPBD. Pelatihan yang dilakukan memang sudah ada, namun belum merata ke semua pegawai. Terkadang hanya beberapa orang saja yang diutus, tergantung dari anggaran dan undangan pelatihan yang tersedia.” Senin, 16 Juni 2025.

Senada dengan itu, Angalita Anugrah Zebua, selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, juga menekankan pentingnya pelatihan bagi peningkatan kapasitas kerja pegawai. Ia menyatakan bahwa:

“Pelatihan sangat berpengaruh terhadap efektivitas kerja di lapangan, khususnya dalam kondisi darurat. Kami berharap ke depan lebih banyak pelatihan teknis yang bisa diikuti oleh semua personel, terutama yang bertugas langsung dalam penanganan bencana.” Senin, 16 Juni 2025.

Sementara itu, informan pendukung, Ir. Amonita Telaumbanua, ST, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, menyampaikan bahwa:

“Saya mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan para informan utama dan kunci. Kami di bidang rehabilitasi juga merasakan pentingnya pembinaan yang berkelanjutan. Tanpa pembinaan yang tepat, pemulihan pasca bencana tidak bisa berjalan maksimal.” Senin, 16 Juni 2025.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Piter Samaira Zai, S.Pi, seorang analis mitigasi bencana, yang mengatakan:

“Saya sangat setuju bahwa pelatihan itu sangat penting. Banyak dari kami yang sebenarnya masih membutuhkan peningkatan kapasitas, baik dalam hal teknis maupun administratif. Apa yang disampaikan kepala badan dan para kepala bidang itu memang nyata kami rasakan di tingkat pelaksana.” Senin, 16 Juni 2025.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pembinaan pegawai di BPBD Kota Gunungsitoli sudah dilakukan namun masih memerlukan penguatan dari sisi cakupan, frekuensi, dan pemerataan. Seluruh informan menunjukkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya pengembangan kapasitas pegawai untuk menunjang efektivitas penanggulangan bencana di wilayah kerja mereka.

4.2.2 Kuantitas

1. Apakah jumlah personel saat ini di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli sudah mencukupi untuk menghadapi berbagai jenis bencana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan dalam penelitian ini, diperoleh gambaran mengenai kecukupan jumlah personel di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gunungsitoli dalam menghadapi berbagai jenis bencana. Informan utama, yaitu Adima P. Harefa, S.Th, M.Si, selaku Kepala BPBD Kota Gunungsitoli menyampaikan bahwa:

"Iya, jumlah personel yang ada saat ini masih belum mencukupi, terutama jika dikaitkan dengan kompleksitas dan keberagaman jenis bencana yang mungkin terjadi di wilayah Kota Gunungsitoli. Kami masih sangat membutuhkan tambahan personel, terutama yang memiliki spesialisasi di bidang-bidang tertentu seperti teknis evakuasi, logistik, serta pemetaan dan mitigasi bencana. Kekurangan ini cukup terasa ketika terjadi bencana besar, di mana beban kerja menjadi sangat tinggi dan tidak sebanding dengan jumlah tenaga yang tersedia." Selasa, 17 Juni 2025

Senada dengan itu, Radius Gea, ST, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan juga menegaskan bahwa:

"Jumlah personel saat ini belum ideal. Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, kami sering kali menghadapi kendala karena keterbatasan sumber daya manusia. Apalagi, dalam upaya memberikan edukasi dan pelatihan kebencanaan kepada masyarakat, kami memerlukan lebih banyak tenaga yang mampu menjangkau seluruh wilayah di Kota Gunungsitoli." Selasa, 17 Juni 2025

Angalita Anugrah Zebua, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, juga menyampaikan pandangan serupa:

"Dalam kondisi darurat, kami sering kali bekerja dengan jumlah personel yang terbatas. Hal ini berdampak pada kecepatan dan efektivitas dalam penanganan bencana. Oleh karena itu, sangat diperlukan penambahan personel, khususnya yang terlatih dalam hal logistik dan distribusi bantuan." Selasa, 17 Juni 2025

Sementara itu, informan pendukung, Ir. Amonita Telaumbanua, ST, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, menyatakan bahwa:

"Kami sangat mendukung apa yang telah disampaikan oleh para informan utama. Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, keterlibatan personel yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan pemulihan berjalan dengan baik dan cepat."

Hal senada juga disampaikan oleh Piter Samaira Zai, S.Pi, Analis Mitigasi Bencana, yang menyampaikan bahwa:

"Saya mendukung sepenuhnya pendapat para pimpinan bidang dan kepala BPBD. Jumlah personel yang ada saat ini belum proporsional dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Dalam upaya mitigasi bencana yang membutuhkan pendekatan teknis dan edukatif secara terus menerus, kekurangan personel menjadi tantangan tersendiri."

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara kepada para informan dalam penelitian ini, seluruh informan menyepakati bahwa jumlah personel di BPBD Kota Gunungsitoli saat ini masih belum mencukupi untuk menghadapi berbagai jenis bencana secara optimal. Kebutuhan akan penambahan personel yang terlatih dan memiliki keahlian di bidang kebencanaan menjadi sangat mendesak guna meningkatkan kapasitas dan responsivitas BPBD dalam melaksanakan tugasnya.

2. Bagaimana perencanaan kebutuhan jumlah sumber daya manusia dilakukan setiap tahunnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para informan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gunungsitoli, diperoleh gambaran bahwa perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dilakukan secara tahunan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan, dinamika tugas kebencanaan, serta mengacu pada perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan perangkat daerah. Informan utama dalam penelitian ini, Adima P. Harefa, S.Th, M.Si, selaku Kepala BPBD Kota Gunungsitoli, menyampaikan bahwa:

"Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia setiap tahunnya di BPBD Kota Gunungsitoli dilakukan melalui evaluasi internal terhadap kinerja dan kebutuhan unit kerja yang ada. Kami mengidentifikasi kekurangan tenaga baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, kemudian kami tuangkan dalam usulan formasi kebutuhan kepada Badan Kepegawaian Daerah. Proses ini juga diselaraskan dengan RPJMD dan Renstra perangkat daerah." Selasa, 17 Juni 2025.

Selanjutnya, Radius Gea, ST, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan, yang juga merupakan informan kunci, menegaskan hal tersebut dan menambahkan bahwa:

"Kami di bidang Pencegahan dan Kesiagaan turut serta dalam mengusulkan kebutuhan SDM, terutama karena kegiatan di bidang ini sangat dinamis dan membutuhkan personel yang siap siaga. Proses usulan SDM juga mempertimbangkan kebutuhan pelatihan dan peningkatan kapasitas." Selasa, 17 Juni 2025.

Sementara itu, Angalita Anugrah Zebua, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, sebagai informan kunci lainnya, menyatakan bahwa:

"Kami menyusun kebutuhan SDM dengan memperhatikan beban kerja yang semakin meningkat, khususnya dalam penanganan darurat bencana. Kekurangan personel, terutama tenaga teknis dan operator logistik, menjadi fokus utama dalam penyusunan rencana kebutuhan tiap tahunnya." Selasa, 17 Juni 2025.

Sebagai informan pendukung, Ir. Amonita Telaumbanua, ST, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, menyatakan mendukung pendapat para informan kunci:

"Saya mendukung apa yang disampaikan oleh pimpinan dan rekan-rekan bidang lainnya. Kami juga berperan dalam menyampaikan kebutuhan tenaga ahli khususnya di bidang rekonstruksi pasca-bencana yang sangat spesifik dan membutuhkan kompetensi tertentu." Selasa, 17 Juni 2025.

Begitu juga dengan Piter Samaira Zai, S.Pi, seorang Analis Mitigasi Bencana, sebagai informan pendukung, menyatakan bahwa:

"Apa yang disampaikan oleh informan utama dan kunci sudah sesuai. Kami di bagian teknis juga merasa pentingnya perencanaan SDM yang berbasis kebutuhan nyata, karena tantangan penanggulangan bencana itu terus berkembang dan perlu respons yang cepat dari personel yang terlatih." Selasa, 17 Juni 2025.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di BPBD Kota Gunungsitoli dilakukan secara sistematis dan kolaboratif, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata di masing-masing bidang dan unit kerja, serta diselaraskan dengan kebijakan daerah dan arah pembangunan daerah. Peran semua informan, baik utama maupun pendukung, menunjukkan adanya sinergi dalam penyusunan rencana kebutuhan SDM yang efektif setiap tahunnya.

3. Dalam kondisi darurat, bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli mengelola keterbatasan jumlah tenaga kerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dalam penelitian ini, diketahui bahwa keterbatasan jumlah tenaga kerja menjadi tantangan signifikan yang dihadapi oleh BPBD Kota Gunungsitoli dalam penanganan kondisi darurat. Namun demikian, badan ini memiliki beberapa strategi adaptif dalam mengelola situasi tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh informan utama dan didukung oleh informan lainnya. Adima P. Harefa, S.Th, M.Si, selaku Kepala Badan sekaligus informan utama/kunci, menyampaikan bahwa:

“Sebagai instansi daerah yang memiliki keterbatasan tenaga kerja, kami mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dengan TNI, Polri, Dinas Kesehatan, dan relawan masyarakat. Di saat darurat, kami membentuk tim-tim ad hoc yang bersifat fleksibel, memanfaatkan SDM yang ada secara maksimal. Kami juga menerapkan sistem kerja bergilir untuk menjaga stamina petugas.” Rabu, 18 Juni 2025.

Hal ini juga ditegaskan oleh Radius Gea, ST, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan sekaligus informan kunci, yang menyampaikan bahwa:

“Dalam kondisi darurat, kita tidak bisa terpaku pada struktur formal saja. Kita cepat bergerak dengan membagi tugas berdasarkan kapasitas individu. Kadang satu orang harus pegang dua sampai tiga peran, tapi semua dilakukan atas dasar tanggung jawab bersama. Kami juga mengandalkan jejaring komunitas lokal sebagai perpanjangan tangan BPBD.” Rabu, 18 Juni 2025.

Senada dengan itu, Angalita Anugrah Zebua, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (informan kunci), menambahkan:

“Kami selalu siap siaga dengan membangun sistem logistik dan komunikasi yang efisien. Keterbatasan personel kami siasati dengan pelatihan berkala, sehingga setiap petugas bisa

bekerja lintas fungsi dalam keadaan darurat. Ini penting agar penanganan bencana tetap berjalan meskipun tenaga terbatas.” Rabu, 18 Juni 2025.

Sementara itu, informan pendukung turut memperkuat pernyataan dari informan kunci. Ir. Amonita Telaumbanua, ST, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, menyatakan bahwa:

*“Apa yang disampaikan oleh pimpinan dan rekan-rekan bidang lain memang benar. Kami juga ikut turun langsung ke lapangan ketika tenaga terbatas. Di BPBD, tidak ada batasan sektoral dalam kondisi krisis semua harus siap ambil bagian.”
Rabu, 18 Juni 2025.*

Hal serupa juga dikemukakan oleh Piter Samaira Zai, S.Pi, Analis Mitigasi Bencana, yang menyampaikan bahwa:

“Saya mendukung sepenuhnya pernyataan para informan kunci. Dalam kondisi darurat, yang utama adalah kerja sama dan kecepatan. Kami selalu diminta siap dalam waktu singkat, dan itu kami atasi dengan sinergi tim dan pemanfaatan sumber daya lokal.” Rabu, 18 Juni 2025.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BPBD Kota Gunungsitoli mengelola keterbatasan jumlah tenaga kerja melalui sinergi lintas sektor, pembentukan tim fleksibel, pelatihan lintas fungsi, serta pemanfaatan komunitas lokal sebagai kekuatan tambahan dalam menghadapi kondisi darurat.

4.2.3 Ketepatan Waktu

1. Bagaimana strategi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli dalam memastikan tim dapat bergerak cepat dan tepat waktu saat terjadi bencana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan di lingkungan BPBD Kota Gunungsitoli, diketahui bahwa strategi untuk memastikan tim dapat bergerak cepat dan tepat waktu saat terjadi bencana telah dirancang secara sistematis dan

terintegrasi. Informan Utama, yaitu Adima P. Harefa, S.Th, M.Si, selaku Kepala Badan, menyampaikan bahwa:

"Sebagai pimpinan, saya menekankan pentingnya sistem kesiapsiagaan yang berkelanjutan, termasuk pelatihan rutin, simulasi penanganan bencana, serta komunikasi lintas sektor yang responsif. Kita sudah menyusun SOP tanggap darurat yang terstruktur dan menempatkan personel pada posisi-posisi strategis. Hal ini penting agar ketika bencana terjadi, tidak ada kebingungan dan tim dapat langsung bergerak sesuai dengan peran masing-masing." Jumat 20 Juni 2025.

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Radius Gea, ST, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang juga merupakan informan kunci, yang menyampaikan bahwa:

"Kami memastikan setiap personel memahami tugasnya melalui pelatihan berkala dan juga pembentukan tim reaksi cepat (TRC) yang selalu siaga. Selain itu, kami memiliki sistem pemantauan dini yang terus dioptimalkan agar informasi potensi bencana bisa cepat kami respon." Jumat 20 Juni 2025.

Senada dengan itu, Angalita Anugrah Zebua, selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang juga merupakan informan kunci, menjelaskan bahwa:

"Dari sisi logistik dan operasional lapangan, kami sudah menyiapkan gudang logistik yang strategis dan selalu update persediaannya. Kami juga bekerja sama dengan berbagai instansi untuk memastikan mobilisasi peralatan dan personel bisa dilakukan dalam hitungan menit. Koordinasi dan sinyal komunikasi cepat menjadi kunci." Jumat 20 Juni 2025.

Selanjutnya, Ir. Amonita Telaumbanua, ST, sebagai informan pendukung dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, menyatakan bahwa:

"Kami mendukung penuh strategi yang telah disampaikan pimpinan dan rekan-rekan bidang terkait. Koordinasi lintas

bidang sangat kami jaga, termasuk dalam tahapan pemulihan pasca bencana, agar tim tetap terintegrasi sejak awal tanggap darurat hingga fase rehabilitasi." Jumat 20 Juni 2025.

Terakhir, Piter Samaira Zai, S.Pi, selaku analisis mitigasi bencana dan informan pendukung, menambahkan bahwa:

"Kami dari tim analisis mendukung upaya percepatan respon bencana dengan memberikan data dan informasi yang akurat kepada pimpinan dan tim lapangan. Kami juga turut aktif dalam pemetaan risiko agar daerah rawan bencana bisa lebih siap dan tim tidak salah langkah saat bertindak." Jumat 20 Juni 2025.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi BPBD Kota Gunungsitoli dalam menjamin kecepatan dan ketepatan waktu penanganan bencana melibatkan sinergi dari berbagai bidang, mulai dari manajerial, kesiapsiagaan, kedaruratan, hingga rehabilitasi dan mitigasi risiko, yang semuanya saling mendukung dalam satu sistem komando terpadu.

2. Apa saja tantangan yang memengaruhi keterlambatan respons atau pelayanan di lapangan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa keterlambatan respons atau pelayanan di lapangan dalam penanggulangan bencana di Kota Gunungsitoli dipengaruhi oleh berbagai tantangan, baik dari sisi sumber daya manusia, peralatan, koordinasi, hingga sistem pelaporan. Hal ini diungkapkan secara langsung oleh para informan utama dan didukung oleh para informan pendukung yang terlibat aktif dalam proses penanganan bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli, Adima P. Harefa, S.Th, M.Si, selaku informan utama, menyampaikan bahwa:

"Salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi dalam keterlambatan respons di lapangan adalah keterbatasan

sumber daya, baik itu personel maupun peralatan. Ketika terjadi bencana, kami sering kekurangan tenaga teknis yang siap turun langsung, dan alat-alat pendukung seperti kendaraan operasional atau alat berat pun jumlahnya sangat terbatas. Ini membuat waktu tanggap kami tidak bisa secepat yang diharapkan masyarakat." Jumat 20 Juni 2025

Senada dengan itu, Radius Gea, ST, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan, menegaskan bahwa:

"Koordinasi antarinstansi juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Kadang informasi awal dari lokasi bencana lambat kami terima atau tidak akurat, sehingga kami terlambat dalam pengambilan keputusan dan pengiriman tim ke lokasi. Belum lagi jika akses ke lokasi bencana sulit dijangkau." Jumat 20 Juni 2025

Sementara itu, Angalita Anugrah Zebua, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, menambahkan bahwa:

"Persediaan logistik yang terbatas juga menjadi tantangan utama. Dalam situasi darurat, logistik seperti makanan, tenda, dan obat-obatan harus segera tersedia, tapi karena keterbatasan anggaran dan distribusi, respons logistik menjadi terhambat." Jumat 20 Juni 2025.

Pernyataan dari para informan kunci tersebut mendapat dukungan dari para informan pendukung. Ir. Amonita Telaumbanua, ST, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, menyampaikan bahwa:

"Kami sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Kepala Badan dan para Kepala Bidang. Memang benar, keterbatasan SDM dan logistik menjadi faktor penghambat utama. Apalagi setelah bencana terjadi, proses rehabilitasi juga memerlukan dukungan data yang tepat, yang seringkali lambat terkumpul." Jumat 20 Juni 2025.

Begitu juga dengan Piter Samaira Zai, S.Pi, selaku Analis Mitigasi Bencana, yang menuturkan bahwa:

"Saya mengamini apa yang telah dijelaskan oleh para atasan kami. Selain faktor internal seperti SDM dan logistik, tantangan lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan dini. Kadang masyarakat menunda melapor atau tidak tahu harus melapor ke mana, sehingga informasi tidak sampai dengan cepat ke kami." Jumat 20 Juni 2025

Dari uraian para informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan respons atau pelayanan di lapangan oleh BPBD Kota Gunungsitoli merupakan hasil dari kombinasi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, logistik, aksesibilitas lokasi, serta kurangnya koordinasi dan kesadaran masyarakat. Dukungan dari semua pihak, baik internal maupun eksternal, sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di daerah ini.

3. Apakah ada evaluasi terhadap kecepatan tanggap darurat yang dilakukan secara berkala di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para informan dalam penelitian ini, diketahui bahwa evaluasi terhadap kecepatan tanggap darurat di BPBD Kota Gunungsitoli dilakukan secara berkala, meskipun terdapat beberapa kendala teknis dan sumber daya dalam pelaksanaannya. Sebagaimana disampaikan oleh Adima P. Harefa, S.Th, M.Si, selaku Kepala Badan sekaligus informan utama/kunci dalam penelitian ini, beliau menyatakan bahwa:

"Evaluasi terhadap kecepatan tanggap darurat memang kami lakukan secara berkala, terutama setelah penanganan kejadian bencana. Evaluasi ini biasanya dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi internal lintas bidang untuk menilai kecepatan respon, kendala lapangan, efektivitas koordinasi, serta kesiapan logistik." Senin, 23 Juni 2025.

Pernyataan ini diperkuat oleh informan kunci lainnya, Radius Gea, ST, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan, yang menyampaikan bahwa:

"Sebagai pelaksana teknis di bidang pencegahan dan kesiagaan, kami sangat mendukung dan terlibat langsung dalam evaluasi pasca kejadian bencana. Evaluasi ini sangat penting untuk melihat bagaimana kesiapsiagaan personel dan seberapa cepat mereka merespons setelah mendapat informasi. Kami menggunakan data waktu tanggap dan laporan lapangan sebagai bahan analisis." *Senin, 23 Juni 2025.*

Hal senada juga disampaikan oleh Angalita Anugrah Zebua, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang menyatakan bahwa:

"Evaluasi terhadap kecepatan tanggap memang sudah menjadi bagian dari prosedur standar di bidang kami. Setelah setiap kejadian darurat, kami mengumpulkan catatan waktu respons, distribusi logistik, serta hambatan yang ditemui. Hal ini kami bahas dalam evaluasi lintas bidang agar menjadi masukan untuk peningkatan kapasitas ke depan." Senin, 23 Juni 2025.

Dukungan terhadap pernyataan para informan kunci juga diberikan oleh informan pendukung. Ir. Amonita Telaumbanua, ST, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, menyampaikan bahwa:

"Kami di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mendukung penuh evaluasi kecepatan tanggap darurat, karena data dari evaluasi tersebut sangat penting untuk merancang tahapan pemulihan. Apa yang disampaikan oleh Kepala Badan dan para kepala bidang sangat kami amini karena memang sudah menjadi budaya kerja bersama di BPBD." Senin, 23 Juni 2025.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Piter Samaira Zai, S.Pi, analis mitigasi bencana, yang menyatakan:

"Sebagai analis, saya melihat evaluasi ini memberikan dasar data yang konkret untuk perencanaan ke depan. Saya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh para pimpinan.

Evaluasi terhadap kecepatan tanggap darurat memang sangat dibutuhkan dan secara rutin dilakukan, meskipun ke depan masih perlu diperkuat dengan sistem digitalisasi untuk mempermudah monitoring waktu tanggap." Senin, 23 Juni 2025.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap kecepatan tanggap darurat memang dilakukan secara berkala oleh BPBD Kota Gunungsitoli, dengan melibatkan lintas bidang dalam prosesnya. Evaluasi ini menjadi landasan penting dalam meningkatkan efektivitas respons bencana di wilayah tersebut.

4.2.4 Efektivitas

1. Menurut Bapak/Ibu, seberapa efektif strategi perencanaan sumber daya manusia yang diterapkan saat ini dalam mendukung penanganan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan dari BPBD Kota Gunungsitoli, dapat disimpulkan bahwa strategi perencanaan sumber daya manusia yang diterapkan saat ini dinilai cukup efektif dalam mendukung penanganan bencana, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dan kebutuhan peningkatan kapasitas. Sebagaimana disampaikan oleh Adima P. Harefa, S.Th, M.Si, selaku Kepala Badan dan sebagai informan utama/kunci, beliau menyatakan bahwa:

"Strategi perencanaan SDM di BPBD Kota Gunungsitoli telah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kompetensi personel melalui pelatihan-pelatihan berkala, koordinasi lintas sektor, serta penguatan struktur organisasi. Namun, kami menyadari bahwa ketersediaan SDM yang benar-benar memiliki keahlian teknis di bidang kebencanaan masih terbatas, sehingga perlu adanya perencanaan yang lebih strategis dan berkelanjutan." Selasa, 24 Juni 2025

Pernyataan ini diperkuat oleh Radius Gea, ST, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan selaku informan kunci, yang menambahkan bahwa:

"Kami menekankan pentingnya kolaborasi antar bidang dalam menyusun strategi SDM, terutama dalam mengantisipasi kejadian bencana yang tidak terduga. Meskipun kami memiliki tim yang solid, peningkatan jumlah dan kualitas SDM tetap menjadi prioritas, khususnya dalam hal pelatihan kesiapsiagaan." Selasa, 24 Juni 2025

Sementara itu, Angalita Anugrah Zebua, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai informan kunci lainnya, menyampaikan bahwa:

"Dalam situasi darurat, kesiapan SDM sangat menentukan kecepatan respon. Strategi kami sejauh ini sudah cukup baik, tapi kami tetap mendorong adanya evaluasi berkala agar sistem perencanaan SDM bisa lebih adaptif terhadap kebutuhan di lapangan." Selasa, 24 Juni 2025

Sebagai informan pendukung, Ir. Amonita Telaumbanua, ST, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mengungkapkan bahwa:

"Saya mendukung apa yang telah disampaikan oleh informan utama dan kunci. Dalam praktiknya, kami memang melihat adanya peningkatan kapasitas tim dalam hal rehabilitasi pasca bencana, namun tentu penguatan SDM di semua lini tetap harus menjadi perhatian utama." Selasa, 24 Juni 2025

Hal serupa disampaikan pula oleh Piter Samaira Zai, S.Pi, Analis Mitigasi Bencana, yang juga sebagai informan pendukung, menyatakan bahwa:

"Apa yang disampaikan oleh pimpinan dan para kepala bidang sangat tepat. Kami di tingkat teknis sangat merasakan manfaat dari strategi SDM yang ada, terutama dalam koordinasi saat penanganan bencana. Namun, kami berharap ke depan ada lebih banyak pelatihan teknis dan peningkatan jumlah personel lapangan." Selasa, 24 Juni 2025

Dari informasi di atas menunjukkan adanya sinergi persepsi antara pimpinan, kepala bidang, hingga pelaksana teknis mengenai strategi perencanaan SDM di BPBD Kota Gunungsitoli. Meskipun secara umum strategi dinilai cukup efektif, semua informan sepakat bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas SDM masih merupakan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan kebencanaan ke depan.

2. Apa indikator yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli untuk mengukur efektivitas kerja tim

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dalam penelitian ini, indikator yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gunungsitoli untuk mengukur efektivitas kerja tim sangat berkaitan dengan koordinasi lintas bidang, kecepatan respons, serta pencapaian target kegiatan penanggulangan bencana yang telah direncanakan. Adima P. Harefa, S.Th, M.Si, selaku Kepala BPBD Kota Gunungsitoli dan informan utama/kunci, menyampaikan bahwa:

“Kami menilai efektivitas kerja tim berdasarkan beberapa indikator penting, seperti kecepatan dan ketepatan dalam merespons kejadian bencana, kemampuan tim dalam melakukan koordinasi antarseksi dan lintas instansi, serta keberhasilan tim dalam menyelesaikan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan. Selain itu, kami juga melihat dari aspek disiplin kerja, komunikasi internal, dan pelaporan kegiatan yang akuntabel.” Selasa, 24 Juni 2025.

Selanjutnya, Radius Gea, ST, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan dan juga informan kunci, menguatkan pernyataan tersebut dengan menambahkan:

“Efektivitas kerja tim terlihat saat terjadi kondisi darurat, di mana seluruh tim dapat menjalankan tugasnya secara sinergis tanpa menunggu perintah berulang. Selain itu, kami juga

mengukur dari hasil simulasi kebencanaan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan.” Selasa, 24 Juni 2025
Demikian juga Angalita Anugrah Zebua, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang turut menjadi informan kunci, menekankan bahwa:

“Kami menilai efektivitas kerja tim dari kesiapsiagaan logistik, kecepatan mobilisasi sumber daya saat bencana terjadi, serta evaluasi pasca tanggap darurat. Jika semua unsur bisa bergerak dalam satu komando dan sesuai SOP, berarti tim bekerja dengan efektif.” Selasa, 24 Juni 2025.

Sementara itu, informan pendukung, yakni Ir. Amonita Telaumbanua, ST, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, menyatakan bahwa:

“Saya mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan oleh para kepala bidang dan kepala badan. Dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi, efektivitas tim juga terlihat dari bagaimana tindak lanjut pascabencana dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran, serta dari kemampuan tim dalam menyusun dokumen perencanaan rehabilitasi yang komprehensif.” Selasa, 24 Juni 2025.

Hal senada juga diungkapkan oleh Piter Samaira Zai, S.Pi, selaku Analis Mitigasi Bencana dan informan pendukung, yang menambahkan bahwa:

“Saya sepakat dengan pendapat para informan kunci, dan dari sisi mitigasi, efektivitas kerja tim kami ukur melalui keberhasilan program edukasi kebencanaan kepada masyarakat, serta implementasi strategi pengurangan risiko bencana secara partisipatif.” Selasa, 24 Juni 2025

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator efektivitas kerja tim di BPBD Kota Gunungsitoli tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga mencakup aspek koordinatif, partisipatif, dan administratif yang saling melengkapi antara bidang satu dengan yang lainnya.

3. Bagaimana sistem koordinasi dan komunikasi antar unit dalam mendukung efektivitas tindakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan kunci dan pendukung di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli, diketahui bahwa sistem koordinasi dan komunikasi antar unit merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung efektivitas tindakan penanggulangan bencana. Informan utama, Adima P. Harefa, S.Th, M.Si, selaku Kepala BPBD Kota Gunungsitoli menyampaikan bahwa:

“Sebagai kepala badan, saya pastikan bahwa setiap unit di BPBD Kota Gunungsitoli memiliki peran yang jelas dan saling terhubung satu sama lain. Koordinasi dilakukan secara formal melalui rapat koordinasi, tetapi juga berjalan secara informal dan cepat melalui grup komunikasi internal. Dengan sistem ini, informasi yang dibutuhkan bisa langsung diteruskan dan ditindaklanjuti dengan cepat.” Rabu, 25 Juni 2025

Hal ini juga diperkuat oleh Radius Gea, ST, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan, yang menyampaikan bahwa sistem komunikasi yang ada cukup efektif, terutama dalam situasi mendesak.

“Kami memiliki SOP dan jalur komunikasi yang jelas. Ketika ada potensi bencana, misalnya banjir atau gempa, kami langsung berkoordinasi lintas bidang. Informasi disampaikan secara langsung baik melalui HT, WA grup, maupun pertemuan darurat. Ini mempercepat respons kami.” Rabu, 25 Juni 2025

Senada dengan itu, Angalita Anugrah Zebua, selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, juga menekankan pentingnya kerja sama antar unit dalam situasi darurat:

“Koordinasi antar unit sudah menjadi kebiasaan kerja kami. Misalnya saat pengiriman logistik ke lokasi terdampak, kami selalu pastikan sudah ada komunikasi dengan bidang terkait

seperti rehabilitasi dan mitigasi. Koordinasi ini tidak hanya internal, tetapi juga lintas instansi.” Rabu, 25 Juni 2025

Sementara itu, Ir. Amonita Telaumbanua, ST, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai informan pendukung, menyampaikan bahwa sistem koordinasi yang ada sangat membantu dalam memastikan kesinambungan penanganan bencana hingga tahap pemulihan.

“Saya mendukung apa yang disampaikan oleh pimpinan dan rekan-rekan dari bidang lainnya. Komunikasi yang lancar dan koordinasi yang baik sangat membantu kami di tahap rehabilitasi. Ketika kami tahu langkah-langkah awal sudah tertangani dengan baik, maka proses pemulihan bisa dirancang lebih tepat.” Rabu, 25 Juni 2025.

Hal senada juga disampaikan oleh Piter Samaira Zai, S.Pi, selaku Analis Mitigasi Bencana yang juga bertindak sebagai informan pendukung.

“Saya juga mendukung sepenuhnya yang disampaikan oleh pimpinan dan para kepala bidang. Di bagian mitigasi, kami banyak bergantung pada data dan informasi dari bidang lain. Koordinasi yang efektif membantu kami dalam membuat perencanaan yang lebih akurat dan menyeluruh.” Rabu, 25 Juni 2025.

Dari pernyataan para informan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem koordinasi dan komunikasi antar unit di BPBD Kota Gunungsitoli berjalan secara efektif dan menjadi kunci utama dalam keberhasilan respons terhadap bencana. Kolaborasi lintas unit melalui jalur komunikasi formal dan informal, serta keterbukaan informasi antar bidang, menjadikan tindakan yang diambil lebih terarah, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

4.2.5 Kemandirian

1. Apakah pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli mampu bekerja secara mandiri dalam situasi darurat tanpa perlu instruksi rinci

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa para pegawai di BPBD Kota Gunungsitoli pada umumnya mampu bekerja secara mandiri dalam situasi darurat. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Adima P. Harefa, S.Th, M.Si, selaku Kepala Badan yang juga merupakan informan utama/kunci dalam penelitian ini. Dalam keterangannya, beliau menyampaikan:

"Sebagian besar pegawai kami telah terlatih untuk mengambil inisiatif di lapangan. Dalam kondisi darurat, mereka tidak menunggu instruksi rinci, karena sudah memahami SOP dan tanggung jawab masing-masing. Ini sangat penting dalam merespons bencana dengan cepat." Kamis, 26 Juni 2025.

Pernyataan tersebut didukung oleh Radius Gea, ST, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan yang juga merupakan informan kunci, yang menyatakan bahwa:

"Kami memang menekankan kesiapsiagaan dan pelatihan yang berkelanjutan. Pegawai kami sudah dibiasakan untuk bersikap responsif dan mandiri, terutama saat bencana terjadi, karena tidak selalu ada waktu untuk koordinasi detail." Kamis, 26 Juni 2025.

Hal senada juga disampaikan oleh Angalita Anugrah Zebua, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang turut menjadi informan kunci. Ia menambahkan bahwa:

"Dalam praktiknya, setiap tim di lapangan sudah mengetahui peran masing-masing. Ketika terjadi bencana, mereka langsung bergerak berdasarkan pemahaman tugas yang sudah dibekali sebelumnya. Kemandirian ini sangat vital dalam keberhasilan penanganan awal." Kamis, 26 Juni 2025.

Sementara itu, Ir. Amonita Telaumbanua, ST, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berperan sebagai informan pendukung, menyatakan bahwa:

"Saya mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan pimpinan dan rekan-rekan bidang lain. Memang benar bahwa budaya kerja mandiri sudah tertanam. Dalam situasi genting, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan tanpa harus menunggu arahan panjang lebar." Kamis, 26 Juni 2025

Demikian juga Piter Samaira Zai, S.Pi, seorang analisis mitigasi bencana dan juga informan pendukung, turut memberikan pendapat yang mendukung pernyataan para informan kunci. Ia menyampaikan bahwa:

"Saya melihat sendiri bagaimana teman-teman di lapangan bertindak cepat dan tepat. Mereka sigap dan tidak bergantung pada instruksi mendetail. Ini membuktikan bahwa pelatihan dan pengalaman mereka sudah cukup membentuk kemandirian dalam bertugas." Kamis, 26 Juni 2025.

Dari keseluruhan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa pegawai BPBD Kota Gunungsitoli dinilai mampu bekerja secara mandiri dalam situasi darurat, dan kemandirian ini merupakan hasil dari pelatihan, pengalaman, serta pemahaman terhadap tugas dan prosedur yang telah ditanamkan secara konsisten.

2. Bagaimana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab individu dalam tim

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli, diketahui bahwa pengembangan inisiatif dan tanggung jawab individu dalam tim menjadi aspek penting dalam pelaksanaan tugas-tugas kebencanaan. Informan utama dalam penelitian ini, Adima P. Harefa, S.Th, M.Si, selaku Kepala BPBD Kota Gunungsitoli menyampaikan bahwa:

“Sebagai Kepala Badan, saya mendorong setiap pegawai dan anggota tim untuk tidak hanya menunggu perintah, tetapi aktif memberikan masukan, ide, dan solusi dalam setiap rapat koordinasi. Kami membangun budaya kerja yang terbuka dan kolaboratif, sehingga setiap individu merasa memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberhasilan tugas-tugas BPBD. Inisiatif pribadi sangat dihargai, terutama saat penanganan bencana yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan.” Selasa 1 Juli 2025.

Selanjutnya, Radius Gea, ST, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan yang juga menjadi informan kunci, menguatkan pernyataan Kepala Badan dengan menyatakan bahwa:

“Benar yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan, kami di bidang Pencegahan dan Kesiagaan selalu menekankan pentingnya peran aktif seluruh anggota. Kami memberikan ruang bagi staf untuk terlibat langsung dalam perencanaan kegiatan dan pengembangan strategi pencegahan. Jadi mereka tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga turut berpikir sebagai perencana.” Selasa 1 Juli 2025.

Sementara itu, Angalita Anugrah Zebua, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik juga turut menyampaikan pandangan serupa:

“Dalam penanganan kedaruratan, inisiatif individu sangat vital. Kami tidak bisa menunggu instruksi secara berjenjang dalam kondisi krisis. Maka dari itu, kami berikan kepercayaan kepada tim di lapangan untuk mengambil keputusan sesuai kondisi di lokasi, tentunya dengan tetap mengacu pada SOP yang ada. Ini menunjukkan bahwa rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri setiap anggota terus kami dorong.” Selasa 1 Juli 2025.

Sebagai informan pendukung, Ir. Amonita Telaumbanua, ST, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, menyatakan bahwa ia

mendukung apa yang disampaikan oleh para informan kunci sebelumnya:

“Saya mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Pak Kepala dan para Kepala Bidang lainnya. Di bidang kami pun, kami mendorong staf untuk proaktif dalam mengusulkan metode rehabilitasi yang inovatif dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat. Kami percaya bahwa semangat tanggung jawab muncul ketika seseorang merasa dipercaya dan dilibatkan.” Selasa 1 Juli 2025.

Senada dengan itu, Piter Samaira Zai, S.Pi, selaku Analis Mitigasi Bencana, menambahkan bahwa:

“Yang dikatakan oleh pimpinan dan rekan-rekan sangat saya rasakan di lapangan. Saya merasa diberi kebebasan untuk mengembangkan metode analisis dan pendekatan mitigasi yang sesuai dengan karakter wilayah Gunungsitoli. Hal ini membuat saya merasa memiliki andil langsung terhadap keberhasilan program dan bukan hanya sebagai pelaksana teknis.” Selasa 1 Juli 2025.

Dari keseluruhan pernyataan para informan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan inisiatif dan tanggung jawab individu di BPBD Kota Gunungsitoli dibangun melalui budaya kerja yang kolaboratif, pemberian kepercayaan, dan pelibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap situasi bencana.

3. Apakah ada program pembinaan yang mendorong kemandirian personel di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para informan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli, diketahui bahwa terdapat program-program pembinaan yang secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk mendorong kemandirian personel dalam menjalankan tugas-tugas

penanggulangan bencana. Informan utama, Adima P. Harefa, S.Th, M.Si selaku Kepala BPBD Kota Gunungsitoli, menjelaskan bahwa:

“Saya sebagai kepala badan, saya melihat pentingnya membentuk personel yang mandiri dan mampu mengambil keputusan cepat dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, kami menyusun beberapa program pelatihan internal dan mengikutsertakan personel dalam pelatihan eksternal baik tingkat provinsi maupun nasional. Ini bagian dari pembinaan yang strategis agar setiap individu tidak hanya bekerja berdasarkan instruksi, tapi juga bisa menginisiasi langkah sendiri secara tepat.” Selasa 1 Juli 2025.

Hal senada disampaikan oleh Radius Gea, ST, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan, yang juga merupakan informan kunci. Ia menambahkan bahwa:

“Dalam bidang kami, ada pelatihan simulasi rutin, edukasi teknis, dan penyusunan rencana kontingensi yang selalu melibatkan personel di semua level. Ini bertujuan supaya mereka terbiasa berpikir sistematis, mandiri, dan siap dalam kondisi apapun.” Selasa 1 Juli 2025.

Sementara itu, Angalita Anugrah Zebua, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, sebagai informan kunci juga menyampaikan bahwa:

“Kami dorong personel untuk aktif terlibat dalam penanganan langsung dan pengelolaan logistik. Mereka dilatih untuk mengambil keputusan cepat dan bertanggung jawab penuh di lapangan, yang pada akhirnya menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian.” Selasa 1 Juli 2025.

Selanjutnya, informan pendukung, Ir. Amonita Telaumbanua, ST, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, menyampaikan bahwa:

“Saya mendukung apa yang disampaikan oleh para informan utama. Dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, kami juga menanamkan nilai kemandirian melalui pelibatan aktif personel dalam proses perencanaan hingga pelaporan

kegiatan. Ini menjadi pembelajaran langsung yang sangat efektif.” Selasa 1 Juli 2025.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Piter Samaira Zai, S.Pi, yang merupakan analis mitigasi bencana dan informan pendukung. Ia mengatakan:

“Saya sangat mendukung pernyataan pimpinan kami. Dalam keseharian, personel diberi ruang untuk mengembangkan diri, termasuk diberi kesempatan memimpin kegiatan tertentu. Ini mendorong tumbuhnya sikap profesional dan mandiri.” Selasa 1 Juli 2025.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BPBD Kota Gunungsitoli telah memiliki berbagai bentuk pembinaan yang tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis, tetapi juga secara langsung mendorong kemandirian personel dalam pelaksanaan tugasnya. Kolaborasi antara pimpinan dan pelaksana teknis memperkuat proses pembelajaran berkelanjutan yang adaptif terhadap dinamika penanggulangan bencana.

4.2.6 Keterampilan (Skill)

1. Keterampilan apa saja yang wajib dimiliki oleh tenaga kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli, terutama yang terlibat langsung dalam penanganan bencana

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dalam penelitian ini, diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai keterampilan yang wajib dimiliki oleh tenaga kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gunungsitoli. Informasi ini dihimpun dari informan utama, kunci, maupun pendukung, yang secara langsung terlibat dalam tugas penanggulangan bencana di daerah tersebut. Informan utama dalam penelitian ini, Adima P. Harefa, S.Th, M.Si, selaku Kepala BPBD Kota Gunungsitoli, menyampaikan bahwa:

"Tenaga kerja di BPBD, khususnya yang berada di lapangan, wajib memiliki keterampilan dasar dalam manajemen bencana, termasuk kemampuan tanggap darurat, koordinasi lapangan, komunikasi krisis, serta penguasaan SOP (Standard Operating Procedure) penanganan bencana. Selain itu, mereka juga harus memiliki ketahanan fisik dan mental, serta mampu bekerja dalam tekanan dan situasi darurat." Rabu, 2 Juli 2025.

Pernyataan ini dikuatkan oleh Radius Gea, ST, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan, yang juga merupakan informan kunci. Ia menyampaikan bahwa:

"Saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Kepala Badan, karena personel kami di lapangan memang harus cepat mengambil keputusan, memiliki keterampilan dalam identifikasi risiko bencana, serta mampu berkomunikasi efektif dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, terutama dalam situasi yang serba cepat dan tidak menentu." Rabu, 2 Juli 2025.

Senada dengan itu, Angalita Anugrah Zebua, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, sebagai informan kunci lainnya, turut mempertegas pentingnya kesiapsiagaan teknis dan operasional, dengan mengatakan bahwa:

"Kemampuan dalam logistik darurat, pengelolaan posko, serta distribusi bantuan menjadi keterampilan teknis yang harus dikuasai oleh petugas di lapangan. Mereka juga harus paham bagaimana melakukan evakuasi korban, asesmen kebutuhan, dan menjaga keamanan logistik di tengah krisis." Rabu, 2 Juli 2025.

Dari sisi rehabilitasi dan rekonstruksi, Ir. Amonita Telaumbanua, ST, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berperan sebagai informan pendukung, menyampaikan bahwa:

"Saya mendukung apa yang disampaikan oleh para informan utama dan kunci, karena memang keterampilan teknis dan

manajerial sangat diperlukan. Terlebih pascabencana, tenaga kerja harus mampu menyusun rencana pemulihan, mengkoordinasikan pembangunan kembali, serta memastikan keberlanjutan dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi." Rabu, 2 Juli 2025.

Hal serupa juga disampaikan oleh Piter Samaira Zai, S.Pi, Analis Mitigasi Bencana yang juga menjadi informan pendukung. Ia mengatakan bahwa:

"Saya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan dan rekan-rekan lainnya. Di bagian mitigasi, kami juga mendorong tenaga kerja agar memiliki keterampilan analisis risiko, pemetaan wilayah rawan bencana, serta edukasi kepada masyarakat. Tanpa pemahaman itu, pencegahan tidak bisa dilakukan secara maksimal." Rabu, 2 Juli 2025.

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja BPBD Kota Gunungsitoli perlu memiliki sejumlah keterampilan penting. Di antaranya adalah keterampilan teknis dalam penanggulangan bencana serta kemampuan komunikasi krisis dan koordinasi lintas sektor. Selain itu, ketahanan fisik dan mental sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi darurat. Penguasaan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan pemahaman tentang manajemen logistik darurat juga merupakan hal yang krusial. Tenaga kerja BPBD juga dituntut memiliki kemampuan dalam proses rehabilitasi, rekonstruksi, serta mitigasi risiko bencana.

2. Bagaimana proses peningkatan keterampilan dilakukan (pelatihan, workshop, simulasi) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para informan dalam penelitian ini, diperoleh informasi bahwa proses peningkatan keterampilan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gunungsitoli dilakukan melalui berbagai metode seperti pelatihan, workshop, dan simulasi. Hal ini disampaikan secara

komprehensif oleh informan utama dan dikuatkan oleh informan pendukung lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Adima P. Harefa, S.Th, M.Si selaku Kepala Badan dan bertindak sebagai informan utama/kunci, ia menyampaikan bahwa:

“Sebagai lembaga yang berhadapan langsung dengan situasi darurat dan bencana, peningkatan kapasitas personel menjadi prioritas kami. Proses ini dilakukan secara berkala melalui pelatihan teknis, workshop tematik, serta simulasi bencana yang melibatkan seluruh unsur, termasuk TNI, Polri, dan masyarakat. Pelatihan tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga bekerja sama dengan BNPB dan lembaga lainnya, sehingga personel kami siap secara teknis maupun mental.”
Rabu, 2 Juli 2025.

Selanjutnya, Radius Gea, ST selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan dan juga sebagai informan kunci, turut menambahkan:

“Kami fokus pada pelatihan berbasis pencegahan, seperti pelatihan evakuasi, pemetaan risiko bencana, dan edukasi kebencanaan di sekolah-sekolah. Workshop kami arahkan pada peningkatan kompetensi teknis, sedangkan simulasi lebih menekankan pada kesiapsiagaan lintas sektor.” Rabu, 2 Juli 2025.

Angalita Anugrah Zebua, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai informan kunci lainnya juga menyampaikan bahwa:

“Peningkatan keterampilan tidak hanya terbatas pada teknis lapangan, tetapi juga logistik dan koordinasi saat tanggap darurat. Dalam simulasi tanggap darurat, kami latih personel untuk melakukan respons cepat, penyaluran logistik, dan pengelolaan posko secara efektif.” Rabu, 2 Juli 2025.

Pernyataan dari para informan kunci tersebut turut didukung oleh para informan pendukung, seperti yang disampaikan oleh Ir. Amonita

Telaumbanua, ST, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang menyatakan:

“Apa yang disampaikan oleh Kepala Badan dan para kepala bidang lainnya sangat tepat. Dari sisi rehabilitasi dan rekonstruksi, kami juga terus meningkatkan pemahaman teknis melalui workshop pascabencana agar proses pemulihan berjalan lebih terarah dan sesuai standar.” Rabu, 2 Juli 2025.

Begitu juga Piter Samaira Zai, S.Pi yang merupakan Analis Mitigasi Bencana, menyatakan dukungannya dengan mengatakan bahwa:

“Saya sangat mendukung apa yang telah disampaikan para pimpinan. Kami di bidang mitigasi juga aktif mengikuti pelatihan dan diskusi teknis, khususnya dalam hal pemetaan risiko, penyusunan dokumen rencana kontinjensi, dan edukasi masyarakat. Semua itu menjadi bagian penting dari peningkatan keterampilan kami.” Rabu, 2 Juli 2025.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses peningkatan keterampilan di BPBD Kota Gunungsitoli dilakukan secara terpadu melalui pelatihan rutin, workshop, dan simulasi. Semua kegiatan tersebut dirancang untuk membentuk personel yang tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga tangguh dalam menghadapi situasi bencana, dengan dukungan penuh dari seluruh unsur struktural di dalam badan tersebut.

3. Apakah ada evaluasi rutin terhadap keterampilan teknis dan non-teknis yang dimiliki oleh staf di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan kunci dan pendukung di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gunungsitoli, diperoleh informasi bahwa memang terdapat bentuk evaluasi terhadap keterampilan teknis maupun non-teknis staf, meskipun masih memiliki sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Informan utama, Adima P. Harefa, S.Th., M.Si, selaku Kepala Badan, menyatakan bahwa:

"Sebagai bagian dari peningkatan kapasitas lembaga, kami memang secara berkala melakukan evaluasi terhadap kemampuan staf, baik secara teknis seperti pemahaman SOP penanggulangan bencana, penggunaan peralatan darurat, maupun keterampilan non-teknis seperti komunikasi, koordinasi lintas sektor, dan kepemimpinan. Evaluasi ini dilakukan melalui kegiatan pelatihan, simulasi, dan penilaian kerja harian yang diamati oleh atasan langsung." Kamis 3 Juli 2025

Pernyataan ini dikuatkan oleh Radius Gea, ST, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan, yang juga merupakan informan kunci. Ia menjelaskan bahwa:

"Kami menilai kemampuan staf melalui keterlibatan mereka dalam pelatihan dan kegiatan simulasi. Setelah kegiatan tersebut, kami melakukan evaluasi, baik melalui diskusi tim maupun laporan tertulis. Ini menjadi tolok ukur apakah staf memahami peran dan tanggung jawabnya dalam situasi darurat." Kamis 3 Juli 2025

Demikian juga, Angalita Anugrah Zebua, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, sebagai informan kunci, menambahkan:

"Kami menilai kesiapan personel dalam merespons kejadian melalui evaluasi pasca-simulasi maupun setelah penanganan kejadian nyata. Evaluasi ini meliputi aspek teknis seperti ketepatan prosedur hingga aspek komunikasi dan kerja sama tim." Kamis 3 Juli 2025.

Sementara itu, Ir. Amonita Telaumbanua, ST, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sebagai informan pendukung, menyampaikan bahwa:

"Apa yang disampaikan oleh pimpinan dan rekan-rekan bidang lain memang benar adanya. Evaluasi terhadap staf kami nilai penting untuk memastikan bahwa personel kami siap

menghadapi kondisi darurat. Selain evaluasi pasca-kegiatan, kami juga memberi perhatian pada umpan balik dari mitra kerja maupun masyarakat saat terjadi tanggap darurat."

Kamis 3 Juli 2025.

Piter Samaira Zai, S.Pi, seorang analis mitigasi bencana yang juga informan pendukung, turut memperkuat pernyataan tersebut:

"Saya mendukung apa yang disampaikan pimpinan kami. Evaluasi memang dilakukan secara tidak formal maupun formal. Kami juga sering berdiskusi internal untuk saling menilai dan memberikan masukan terhadap kinerja satu sama lain, baik dari segi teknis maupun non-teknis." Kamis 3 Juli 2025.

Dengan demikian, dari keseluruhan wawancara dapat disimpulkan bahwa BPBD Kota Gunungsitoli memang melaksanakan evaluasi rutin terhadap keterampilan teknis dan non-teknis stafnya, yang dilakukan melalui pelatihan, simulasi, pengamatan langsung, serta refleksi setelah penanganan bencana. Hal ini dianggap penting oleh semua informan untuk memastikan kesiapsiagaan dan efektivitas dalam tugas penanggulangan bencana.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Kualitas Kerja Pegawai

Berdasarkan hasil wawancara, temuan menunjukkan bahwa kualitas kerja pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gunungsitoli dinilai baik oleh para informan, baik dari pimpinan hingga pelaksana teknis di lapangan. Mereka menilai bahwa anggota tim memiliki ketanggapan yang tinggi, disiplin dalam menjalankan tugas sesuai prosedur operasional, serta mampu bekerja sama lintas sektor dalam merespons berbagai situasi kebencanaan. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan kendala koordinasi, semangat kerja dan dedikasi anggota tim tetap menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan tugas. Temuan ini mencerminkan bahwa BPBD Kota Gunungsitoli telah

berhasil membangun kultur kerja yang tangguh dan kolaboratif, yang menurut Fauzan, R., & Lestari, S. (2022), merupakan bagian dari indikator utama dalam kinerja sektor publik, khususnya dalam bidang kebencanaan. Komitmen dan sikap tanggap yang ditunjukkan oleh para pegawai sejalan dengan teori Pratama, A. (2021) yang menyebutkan bahwa organisasi penanggulangan bencana harus memiliki kemampuan adaptif tinggi untuk menghadapi dinamika di lapangan.

Temuan juga menunjukkan bahwa BPBD Kota Gunungsitoli telah menerapkan standar mutu kerja secara khusus, baik yang mengacu pada peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 maupun melalui penyusunan SOP internal di masing-masing bidang. Hal ini memberikan struktur kerja yang jelas dan sistematis bagi setiap unit kerja. Informan menjelaskan bahwa SOP dijadikan pedoman utama dalam setiap tahapan penanganan bencana, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Temuan ini didukung oleh teori Samsudin, A., & Hariani, I. (2021) yang menyatakan bahwa keberadaan standar mutu kerja dalam organisasi publik berfungsi sebagai alat kontrol manajemen mutu, yang menjamin efisiensi serta konsistensi pelayanan. Wibowo, S. (2020) juga menekankan bahwa penerapan SOP yang baik dalam birokrasi publik akan meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat struktur koordinasi lintas bidang, terutama dalam penanganan bencana yang melibatkan banyak pihak.

Selanjutnya, temuan ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pembinaan pegawai telah dilakukan secara berkala, baik melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BNPB maupun lembaga lain di tingkat regional dan nasional. Namun, temuan juga menunjukkan bahwa pelatihan belum merata karena terkendala oleh keterbatasan anggaran dan kesempatan, sehingga belum semua pegawai memperoleh akses yang sama terhadap peningkatan kapasitas. Hal ini menguatkan pandangan Rahmawati, N., & Yuliana, R. (2023) yang menyatakan bahwa pelatihan dalam organisasi penanggulangan bencana harus bersifat berkelanjutan dan menyeluruh agar seluruh personel memiliki kemampuan yang setara dalam

menghadapi situasi darurat. Hidayat, R. (2021) juga menekankan bahwa pembinaan teknis dan administratif yang berkesinambungan merupakan fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang siap menghadapi bencana secara profesional dan efisien.

4.3.2 Kualitas Pegawai

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para informan kunci di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gunungsitoli, diperoleh gambaran bahwa jumlah personel yang dimiliki saat ini masih belum mencukupi untuk menghadapi kompleksitas dan keberagaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah tersebut. Kepala BPBD Kota Gunungsitoli, bahwa kebutuhan terhadap personel yang memiliki kompetensi khusus di bidang teknis evakuasi, logistik, serta mitigasi dan pemetaan bencana sangat mendesak. Hal ini diperkuat oleh pernyataan kepala bidang lainnya yang turut menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas, mereka kerap kali mengalami kendala akibat keterbatasan jumlah sumber daya manusia. Kekurangan ini sangat terasa pada saat terjadi bencana besar, ketika seluruh personel dituntut untuk bekerja cepat dan tanggap dalam situasi yang penuh tekanan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Wibowo, R., & Kusumastuti, R. D. (2021) yang menekankan bahwa kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam kesiapsiagaan bencana. Tanpa jumlah dan kompetensi personel yang memadai, maka efektivitas penanggulangan bencana akan terganggu. Mereka juga menambahkan bahwa institusi kebencanaan di daerah perlu terus mengembangkan strategi rekrutmen dan pelatihan berkelanjutan untuk memperkuat respons terhadap bencana yang makin kompleks akibat perubahan iklim dan urbanisasi.

Dalam merespons kebutuhan yang terus berkembang, BPBD Kota Gunungsitoli melaksanakan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis setiap tahunnya. Proses ini dilakukan melalui evaluasi internal yang mencakup analisis beban kerja serta identifikasi kekurangan tenaga kerja baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi. Hasil evaluasi

tersebut kemudian dituangkan dalam usulan formasi kebutuhan pegawai yang diajukan kepada Badan Kepegawaian Daerah. Selain itu, perencanaan ini diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Masing-masing bidang turut berperan aktif dalam menyusun kebutuhan SDM berdasarkan tugas dan tanggung jawab spesifik yang mereka emban, dengan mempertimbangkan dinamika kebencanaan yang semakin kompleks dari tahun ke tahun. Sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Pramudito, A., & Nugroho, A. H. (2023) menyatakan bahwa perencanaan SDM yang berbasis kebutuhan riil dan disesuaikan dengan strategi daerah merupakan pendekatan ideal dalam tata kelola kelembagaan penanggulangan bencana. Mereka juga menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan SDM dan perencanaan strategis kelembagaan agar terjadi sinergi dan kesinambungan program.

Di tengah keterbatasan jumlah personel, BPBD Kota Gunungsitoli mengembangkan sejumlah strategi adaptif untuk memastikan pelayanan penanggulangan bencana tetap berjalan optimal, khususnya dalam situasi darurat. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan TNI, Polri, Dinas Kesehatan, serta relawan masyarakat. BPBD juga membentuk tim ad hoc yang bersifat fleksibel dan menerapkan sistem kerja bergilir guna menjaga stamina dan efektivitas kerja personel. Setiap pegawai dituntut memiliki kemampuan lintas fungsi, sehingga mampu menjalankan berbagai tugas secara simultan saat kondisi krisis. Selain itu, pemanfaatan komunitas lokal sebagai perpanjangan tangan BPBD menjadi bagian dari strategi kolaboratif yang diterapkan untuk memperluas jangkauan pelayanan kebencanaan di lapangan. Hal ini relevan dengan gagasan Ramadhan, D. A., & Sari, M. F. (2022), yang menyoroti pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas kelembagaan dalam menghadapi situasi darurat. Menurut mereka, organisasi kebencanaan yang terlalu birokratis cenderung lamban dalam merespons, sehingga dibutuhkan struktur organisasi yang cair, kolaboratif, dan berbasis jejaring. Pendekatan berbasis komunitas juga

dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat respon dan memperkuat ketahanan lokal. Pendekatan yang diterapkan BPBD Kota Gunungsitoli ini menunjukkan adanya kesadaran institusional terhadap pentingnya sinergi dan fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Meskipun masih menghadapi keterbatasan dalam hal jumlah tenaga kerja, BPBD terus berupaya memperkuat kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, evaluasi tahunan, dan kolaborasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan teori-teori manajemen kebencanaan kontemporer yang menekankan pentingnya adaptasi kelembagaan, pemberdayaan komunitas lokal, serta sistem kerja yang tangguh dalam merespons ancaman bencana yang semakin kompleks.

4.3.3 Ketepatan Waktu dalam Respons Bencana

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan kunci di BPBD Kota Gunungsitoli, diketahui bahwa strategi untuk menjamin ketepatan waktu dalam respons terhadap bencana dirancang secara sistematis dan menyeluruh. Kepala BPBD Kota Gunungsitoli, Adima P. Harefa, menekankan pentingnya kesiapsiagaan berkelanjutan, termasuk melalui pelatihan, simulasi tanggap darurat, dan penempatan personel pada posisi strategis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pendekatan ini menunjukkan adanya sistem komando yang terstruktur agar tidak terjadi kebingungan saat bencana terjadi. Strategi ini juga didukung oleh keberadaan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang siaga dan sistem pemantauan dini yang terus dioptimalkan. Dari sisi operasional, BPBD telah mempersiapkan gudang logistik yang strategis dan memperkuat sinyal komunikasi untuk mendukung percepatan mobilisasi. Selain itu, penyediaan data risiko dan pemetaan wilayah rawan turut mendukung akurasi tindakan tanggap darurat di lapangan. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Hidayat, R., & Lubis, M. A. (2022) yang menyatakan bahwa kecepatan dalam respons bencana sangat ditentukan oleh integrasi sistem peringatan dini, kesiapsiagaan SDM, dan penguasaan medan melalui peta risiko. Menurut mereka, ketepatan waktu dalam merespons

tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga soal koordinasi lintas sektor yang berjalan secara efektif dan efisien.

Namun demikian, keterlambatan dalam respons bencana tetap menjadi tantangan yang dihadapi BPBD Kota Gunungsitoli. Hambatan utama yang diidentifikasi mencakup keterbatasan jumlah personel dan peralatan, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta sulitnya akses ke lokasi bencana. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan dini juga berkontribusi terhadap lambatnya distribusi informasi awal, yang sangat memengaruhi proses pengambilan keputusan dan pengerahan tim. Menurut Rahmat, A., & Aryani, F. N. (2021), respons bencana yang efektif sangat tergantung pada kualitas sistem informasi dan pelaporan awal yang cepat dan akurat. Keterlambatan informasi awal sering kali menyebabkan kegagalan dalam mobilisasi cepat, bahkan di wilayah yang memiliki protokol kesiapsiagaan yang memadai. Sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan, BPBD Kota Gunungsitoli juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap kecepatan tanggap darurat yang telah dilakukan. Evaluasi ini mencakup waktu respon, efektivitas koordinasi, distribusi logistik, dan kesiapan personel di lapangan. Evaluasi dilakukan melalui rapat lintas bidang setelah setiap kejadian bencana, dan dijadikan sebagai masukan penting dalam perencanaan dan penguatan kapasitas ke depan.

Kegiatan evaluasi ini mencerminkan pendekatan *learning organization* dalam manajemen bencana, sebagaimana dikemukakan oleh Setiawan, D., & Nugraha, A. (2023), yang menyatakan bahwa lembaga penanggulangan bencana harus terus mengkaji setiap respons yang dilakukan untuk menemukan pola perbaikan yang berkelanjutan. Evaluasi berbasis data konkret menjadi pilar penting dalam membangun ketangguhan kelembagaan dan meningkatkan efektivitas sistem tanggap darurat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi BPBD Kota Gunungsitoli dalam menjamin ketepatan waktu dalam penanganan bencana mencakup sistem kesiapsiagaan yang menyeluruh, koordinasi lintas sektor, pemanfaatan data risiko, dan evaluasi pascakejadian. Meski

dihadapkan pada sejumlah tantangan, komitmen untuk terus memperbaiki respons bencana menjadi kekuatan utama dalam membangun ketangguhan daerah.

4.3.4 Efektifitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gunungsitoli, dapat disimpulkan bahwa strategi perencanaan sumber daya manusia (SDM) dinilai cukup efektif dalam mendukung penanganan bencana. Efektivitas ini ditunjukkan melalui peningkatan kapasitas personel, pelatihan berkala, penguatan struktur organisasi, serta adanya koordinasi dan komunikasi lintas bidang. Temuan ini sejalan dengan pendapat Suwondo, H., & Mahardika, Y. (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas strategi perencanaan SDM dalam organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pelatihan, dukungan struktural, dan sinergi antar unit kerja. Mereka menekankan bahwa dalam organisasi penanggulangan bencana, fleksibilitas dan adaptivitas sangat penting agar organisasi mampu merespons dinamika di lapangan secara cepat.

Selain itu, efektivitas kerja tim diukur melalui beberapa indikator utama seperti kecepatan respons, koordinasi lintas instansi, capaian program, serta kedisiplinan dan akuntabilitas dalam pelaporan kegiatan. Prasetyo, D. H., & Nuraini, R. (2022) menegaskan bahwa indikator efektivitas tim dalam konteks kebencanaan harus mencakup responsivitas, kolaborasi antar unit, serta keberhasilan dalam simulasi dan realisasi program kerja. Sementara itu, dari sisi koordinasi dan komunikasi antar unit, BPBD Kota Gunungsitoli telah membangun sistem yang cukup efisien, baik melalui jalur formal (rapat, SOP, laporan) maupun informal (grup WA, komunikasi langsung). Hal ini selaras dengan pendapat Ramadhani, A., & Sutanto, R. (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana sangat ditentukan oleh sistem komunikasi krisis yang cepat, terbuka, dan adaptif antar unit kerja serta keterlibatan lintas sektor.

4.3.5 Kemandirian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gunungsitoli telah terbentuk dengan baik. Pegawai dinilai mampu bertindak cepat dan tepat dalam situasi darurat tanpa bergantung pada instruksi rinci, menunjukkan adanya pemahaman yang kuat terhadap SOP, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Temuan ini sejalan dengan pendapat Yuniarti, D., & Farhan, M. (2021) yang menyatakan bahwa kemandirian dalam organisasi publik dapat dicapai melalui penguatan kapasitas individu yang dikembangkan melalui pelatihan berkelanjutan, pengalaman langsung, serta kepemimpinan yang mendukung budaya inisiatif. Dalam konteks penanggulangan bencana, kemandirian pegawai menjadi kunci untuk mempercepat respons awal yang sering kali tidak memungkinkan komunikasi struktural yang lengkap.

BPBD Kota Gunungsitoli juga mendorong inisiatif dan tanggung jawab individu dalam tim. Karyawan tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga turut dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip empowerment dalam manajemen sumber daya manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Widodo, A., & Permana, R. (2022) bahwa keterlibatan pegawai secara aktif akan meningkatkan rasa memiliki terhadap organisasi dan memacu tumbuhnya rasa tanggung jawab serta keberanian untuk bertindak secara mandiri. Dukungan terhadap pengembangan kemandirian ini juga terlihat dari adanya program pembinaan, baik dalam bentuk pelatihan internal, simulasi kebencanaan, keterlibatan dalam kegiatan lintas bidang, hingga keikutsertaan dalam pelatihan eksternal tingkat provinsi atau nasional. Hal ini sesuai dengan teori dari Wulandari, S., & Hidayat, R. (2023) yang menekankan bahwa organisasi yang tangguh harus mengembangkan pembelajaran organisasi (*organizational learning*) yang memungkinkan pegawai untuk belajar dari pengalaman dan situasi riil di lapangan, sehingga tercipta individu yang adaptif dan mandiri. Dengan demikian, budaya organisasi yang dibangun

oleh BPBD Kota Gunungsitoli telah mengarah pada terbentuknya kemandirian yang kuat di kalangan pegawai. Hal ini tercapai melalui perpaduan antara pelatihan teknis, kepercayaan pimpinan, dan sistem kerja kolaboratif yang mendorong pengambilan inisiatif dalam batas-batas yang bertanggung jawab.

4.3.6 Keterampilan (Skill)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan teknis dan non-teknis merupakan komponen esensial yang wajib dimiliki oleh personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gunungsitoli, terutama bagi mereka yang berada di garis depan dalam penanganan bencana. Keterampilan tersebut mencakup aspek teknis seperti manajemen bencana, pemahaman SOP, koordinasi lapangan, pengelolaan logistik darurat, evakuasi korban, serta penyusunan rencana kontinjensi. Di sisi lain, keterampilan non-teknis yang tidak kalah penting mencakup komunikasi krisis, kepemimpinan situasional, pengambilan keputusan dalam tekanan, serta ketahanan fisik dan psikologis. Temuan ini diperkuat oleh Kurniawan, R., & Nugroho, A. (2021) yang menyatakan bahwa dalam penanggulangan bencana, kompetensi pegawai harus melampaui aspek teknis semata, dan mencakup kemampuan dalam memimpin di situasi tidak pasti serta menjalin komunikasi lintas sektor secara efektif. Dalam kondisi darurat, keberhasilan suatu tindakan tidak hanya bergantung pada kecakapan teknis, tetapi juga pada kecerdasan emosional dan keterampilan interpersonal personel yang terlibat.

Dalam pengembangan sumber daya manusia, BPBD Kota Gunungsitoli menerapkan pendekatan sistematis dan berkelanjutan melalui pelatihan teknis, workshop berbasis tema, simulasi kebencanaan, serta pelatihan kolaboratif dengan lembaga terkait. Hal ini sesuai dengan konsep *capacity development* dari Rahmadani, N., & Siregar, H. (2022), yang menekankan bahwa penguatan kapasitas dalam organisasi penanggulangan bencana harus berbasis pada praktik yang sesuai dengan realitas lokal dan bersifat adaptif terhadap dinamika lapangan. Sari, D., & Widiyanto, A.

(2021) menjelaskan bahwa dalam lingkungan organisasi publik yang bergerak di bidang penanggulangan bencana, pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) memiliki efektivitas tinggi dalam meningkatkan responsivitas individu terhadap kondisi krisis. Pelatihan yang melibatkan skenario riil akan membentuk respons reflektif dan meningkatkan ketajaman analisis situasional personel.

Evaluasi terhadap keterampilan juga menjadi bagian integral dari sistem pengembangan kompetensi di BPBD. Evaluasi dilakukan tidak hanya secara formal melalui sertifikasi dan simulasi, tetapi juga secara informal melalui pengamatan langsung terhadap kinerja, diskusi tim, dan umpan balik dari mitra kerja. Menurut Fitriyah, N., & Hartono, E. (2023), evaluasi yang efektif terhadap tenaga kebencanaan harus mempertimbangkan aspek *hard skills* seperti kemampuan teknis, serta *soft skills* seperti ketahanan emosi, fleksibilitas, dan kolaborasi. Penekanan pada keseimbangan antara dua jenis keterampilan ini sejalan dengan pemikiran Prasetyo, H., & Handayani, M. (2021) yang menyebutkan bahwa kesiapan menghadapi bencana tidak hanya diukur dari kecanggihan alat dan kecepatan operasional, tetapi dari integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang selaras dengan etika kebencanaan. Selain itu, pendekatan integratif dan partisipatif yang diterapkan BPBD Kota Gunungsitoli dalam pengembangan SDM juga mencerminkan teori dari Lestari, W., & Wahyuni, D. (2022), yang menyoroti bahwa partisipasi aktif personel dalam pelatihan dan proses perencanaan akan meningkatkan rasa memiliki dan mempercepat internalisasi nilai-nilai tanggap darurat. BPBD juga menerapkan pelatihan yang bersifat lintas sektor, bekerja sama dengan unsur TNI, Polri, PMI, serta organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya perspektif peserta pelatihan, tetapi juga menciptakan jejaring kerja yang solid saat menghadapi situasi riil. Sesuai dengan pendapat Susanto, R., & Zulfikar, M. (2021), kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam menciptakan sistem manajemen bencana yang inklusif dan adaptif.